

## **SKRIPSI**



# **PEMENUHAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KAB. TANAH TORAJA**

**OLEH:**

**NATAS GEORGE BULO**

**B 111 08 818**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMENUHAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) TERHADAP  
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS II B KAB. TANAH TORAJA**

**OLEH:  
NATAS GEORGE BULO  
B 111 08 818**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : **NATAS GEORGE BULO**  
NIM : **B 111 08 818**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul : **Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB)  
Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas  
II B Kab. Tanah Toraja**

Telah di Periksa dan disetujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Juli 2013

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H**  
NIP.19620105198601 1 001

**Pembimbing II**

**Hj. Haeranah,S.H.,M.H**  
NIP.196612121991032002

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NATAS GEORGE BULO**  
No. Pokok : **B 111 08 818**  
B a g i a n : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB)  
Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan  
Negara Klas II B Kab. Tanah Toraja**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2013

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## **ABSTRAK**

**Natas George Bulo (B111 08 759), Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kab.Tanah Toraja, di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kab.Tanah Toraja, dan untuk mengetahui factor yang menghambat dalam pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kab.Tanah Toraja.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Toraja, yaitu di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kab.Tanah Toraja. Penulis mengambil data yang diperlukan dari petugas RutanKlas II B Kab.Tanah Toraja,wawancara pada beberapa petugas RutanKlas II B Kab.Tanah Toraja serta berbagai kepustakaan yaitu literatur, dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kab.Tanah Toraja sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang mengaturnya.Faktor yang menghambat pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kab.Tanah Toraja yaitu masih adanya masyarakat yang belum mau menerima Narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat, Narapidana Rutan tidak melapor sesuai dengan waktu yang ditentukan, Narapidana melakukan pelanggaran baru,penolakan berkas Narapidana dari Kementrian Hukum dan HAM setempat, dan yang terakhir tidak adanya penjamin bagi Narapidana yang mengajukan CMB.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Salam Sejahtera Untuk Kita Semua**

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur kepada **Tuhan Yang Maha Esa** , dimana berkat limpahan rahmat, karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kab. Tanah Toraja”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan . sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada **Tuhan Yang Maha Esa**, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya. Kemudian dengan rasa rendah hati dan rasa

hormat yang sangat tinggi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, **Agustinus Bulo,S.H.** dan **Milka Pasulu,SE.,Msi.** selama ini telah banyak berkorban baik materi maupun energi. Serta keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang terbaik buat penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari **Prof.Dr.Andi Sofyan, S.H. M.H** selaku pembimbing I skripsi dan **Hj.Haeranah,S.H.,M.H** selaku pembimbing II skripsi yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, serta optimisme kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak .Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Bapak Prof. Dr.Ir.Abrar Saleng, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik., Bapak Dr.Anshori Ilyas, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romi Librayanto,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof.Dr.Aswanto,S.H.,M.S.,DFM., H.M.Imran Arief,S.H.,M.H., dan Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H. yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
5. Bapak Marcel Hendrapaty, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Rutan klas II B Kab.Tanah Toraja beserta jajarannya
7. Para dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Pihak Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas.
9. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Ramalang, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Sri, Kak Lina, Kak Tri, Ibu Ida, Ibu Haji, Pak Sardi, Pak Roni dan seluruh Staf Akademik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 10.Keluarga besar PMK FH-UH dan Lorong Hitam FH-UH yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 11.Sahabat-sahabat di“DLF” Alim Bachri,S.H., Muhammad Hidayat,S.H., Nurman,S.H., Joxi,S.H., Andi Purnama Sari,S.H,

Muhammad Saiful, Rafiuddin, Abdul Hafid, Abdul Kadir, Yudi Kiswanto, Norman Bryan, Ardy Kurniawan Bombing, Adlyanus Mambela, Bayu Nugraha Lazuardi, Aswar Amir, Muhammad Rahmad, Muhammad Agus, Andi Gunawan Agus, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Sahabat KKN Gel.82 Tahun 2012 di Kec.Marioriwawo, Kab.Soppeng

13. Keluarga besar mahasiswa fakultas hukum angkatan 2008 tanpa terkecuali.

Serta seluruh pihak yang telah mendoakan dan membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi penuh warna dan penuh arti dan banyak menciptakan kisah yang akan penulis jadikan kisah klasik yang tak lekang oleh waktu.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan makna positif bagi kita semua terutama mahasiswa FH-UH (Fakultas Hukum-Universitas Hasanuddin) dan perkembangan ilmu Hukum. Amin

Makassar, Juli 2013

**Natas George Bulo**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Cuti Menjelang Bebas .....	8
1. Pengertian Cuti Menjelang Bebas .....	8
2. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas .....	8
3. Pelepasan Bersyarat.....	11
4. Cuti Bersyarat .....	14
B. Pengertian Narapidana .....	14
C. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	14
1. Pengertian Pidana .....	14
2. Teori Pemidanaan.....	18
3. Jenis-jenis Pidana.....	22
D. Lembaga Pemasyarakatan .....	31
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	31
2. Fungsi dan Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan.....	34
3. Hak-Hak Narapidana .....	36
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis dan Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Tanah Toraja.....	41

B. Faktor yang Menghambat Dalam Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Tanah Toraja .....	52
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, di mana tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga didalamnya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercapai keadilan, maka masalah pemidanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang patut disoroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia.

Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal. Mereka (terpidana) kemudian tinggal hidup di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang sama sekali asing baginya. Mereka bercampur dan bergaul dengan penjahat dan berbagai bentuk manusia yang bertabiat/kebiasaan yang berbeda, begitu pula bahasa dan asal usul yang beraneka ragam.

Pidana bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan bagi yang dikenainya. Pertanyaan yang cukup relevan adalah apakah dasar, tujuan serta hakekat dari pidana dan pemidanaan sudah sesuai dengan kondisi sekarang. Jenis pidana di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,

kurungan dan denda, sedangkan untuk pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan adalah pidana hilang kemerdekaan khususnya pidana penjara. Pidana penjara dilaksanakan dibelakang tembok tebal yang sama sekali asing untuk mereka yang menjalaninya. Dibelakang tembok tebal tersebut atau yang sering disebut penjara. Narapidana akan dibina dan dididik agar mereka menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga negara.

Dibandingkan dengan sistem kepenjaraan yang berbau kolonial, sistem yang diterapkan adalah sistem pemasyarakatan .Di dalam pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan, karena dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan Bergeraknya saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai. Zaman pemasyarakatan dimulai dari 1963-1981 terdiri dari :

1. Periode Pemasyarakatan ke I (1963-1966) lahirnya sistem pemasyarakatan;
2. Periode Pemasyarakatan ke II (1966-1975) (Periode Bina Tuna Warga);
3. Periode Pemasyarakatan ke III (1975-1981) (Kembali Ke Pemasyarakatan).

Ilmu mengenai pidana atau yang disebut penologi dalam istilah hukum pidana memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana. Penologi atau yang mempunyai arti ilmu pengetahuan tentang hukuman tidak dapat dipisahkan dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memegang peranan penting dalam melaksanakan penologi. Sistem pemasyarakatan sebagai sub sistem dari peradilan pidana, kurang mendapat perhatian dibanding dari sub sistem lainnya dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Tujuan pemidanaan terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) rancangan KUHP tahun 2007, yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Usaha-usaha perbaikan dan penambahan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem kepenjaraan terus dilakukan, sehingga akhirnya sampailah pada usaha untuk menggantikan sistem kepenjaraan ke sistem perlakuan lain yang dapat dirasakan keberhasilannya jika dibandingkan dengan sistem kepenjaraan yang lama yang berbau kolonial. Sistem yang diterapkan adalah sistem pemasyarakatan. Karena dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan Bergeraknya saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai.

Sistem pemasyarakatan sebagai sub sistem dari peradilan pidana, hanya lebih menonjol dalam mewujudkan tujuan kedua dan keempat tersebut di atas. Dalam KUHP hanya menentukan prosedur yang menjadi wewenang penyidik, penyelidik, penuntut umum, bantuan hukum dan berhenti pada proses di pengadilan. Sedangkan proses pelaksanaan pemidanaan dan proses melepaskan kembali terpidana ke dalam masyarakat sering kali tidak dibicarakan. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu diadakan evaluasi mengenai konsepsi pemasyarakatan dan bagaimana menurut undang-undang pemasyarakatan serta realisasi pelaksanaan dilapangan. Dalam rancangan KUHP, ditentukan tujuan pemidanaan antara lain perlunya kita memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna Pasal 54 ayat (2) Rancangan KUHP dan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan 11 hal, dalam Pasal 55 Rancangan KUHP tahun 2007 disebutkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial; dan ekonomi pembuat tindak pidana;



- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Diantara kesebelas hal di atas yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam hubungannya dengan memasyarakatkan narapidana adalah : riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat. Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan bagian dan bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Dimana dalam pembinaan narapidana, mereka tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat juga sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Cuti Menjelang Bebas ini salah satunya bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. Hal ini sangatlah penting dalam menjaga hak terpidana.

Pengaturan dan pelaksanaan CMB haruslah sesuai antara *das sollend* dan *das sein*, agar semua tidak terjadi kesenjangan antara

apayang diatur dengan apa yang dilaksanakan. Hal ini juga berguna agar masyarakat dapat mengetahui hak-hak terpidana.

Oleh karena itu Penulis mengambil judul Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) DiRumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka daftar Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara salah satunya adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tana Toraja.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas di RUTANKelas II B Kabupaten Tanah Toraja?
2. Faktor apakah yang menghambat dalam pemenuhan pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap narapidana di RUTAN Kelas II B KabupatenTanah Toraja?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis bukan hanya sekedar menulis dan melakukan penelitian , tetapi ada tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh, selain sebagai tuntutan studi.

Tujuan dan kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemenuhan hak narapidana mendapatkan Cuti Menjelang Bebas di RUTAN Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pemenuhan pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap narapidana di RUTAN Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di dibidang ilmu hukum, khususnya bagi Hukum Pidana.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan Cuti Menjelang Bebas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Cuti Menjelang Bebas**

##### **1. Pengertian Cuti Menjelang Bebas**

Cuti Menjelang Bebas ( CMB ) Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pasal I ayat (3) : *“Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.”*

##### **2. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas**

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, (<http://rutanparigi.blogspot.com/2012/03/sebagaimana-yang-tercantum-dalam.html#.UTrKulurNvY>) menegaskan bahwa :

##### **Pasal 5**

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

## **Pasal 6**

1. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
  - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
  - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
    - 1) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    - 2) Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
    - 3) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - 4) Masa pidana yang telah dijalani untuk:
    - a) Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
    - b) Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
    - c) Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
    - d) Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
2. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
  - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;

- d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
  - 1) Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
  - 2) Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

### **Pasal 7**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
7. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
  - a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
  - b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

### **3. Pelepasan Bersyarat**

Di samping pidana bersyarat, dikenal pula pelepasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pelepasan bersyarat terpidana harus menjalani pidananya paling kurang dua per tiga-nya. Pelepasan bersyarat ini tidak imperatif dan otomatis, dikatakan “dapat” diberikan pelepasan bersyarat.

Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

Maksud pelepasan bersyarat sama dengan pidana bersyarat, ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Oleh karena itulah, sebelum diberikan pelepasan bersyarat kepada terpidana, harus dipertimbangkan masak-masak kepentingan masyarakat yang menerima bekas terpidana. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang telah diperolehnya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan tentang pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP dan stbl.1917 No.749, stbl.1962 No.151 jo.486 dan stbl.1939 No.77.

Ketentuan tentang pelepasan bersyarat tersebut baru dikenal setelah wvs (KUHP) yang berlaku 1 januari 1918. Sementara itu, pidana bersyarat lebih belakangan lagi yaitu 1 januari 1927.

Alasan terlambatnya kedua lembaga tersebut diberlakukan di Indonesia karena kurang mampunya lembaga reklasering dan polisi untuk melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.

Keadaan pada tahun 1918 telah menjadi lebih baik. Jika tidak berbahaya bagi masyarakat untuk menerima pelepasan bersyarat bagi terpidana yang dipenjarakan lama, dibukalah kemungkinan pelepasan bersyarat ini.

Semula lembaga ini menentukan harus dijalani pidana sekurang-kurangnya tiga per empat dan paling kurang tiga tahun. Jadi, hanya diperuntukkan bagi pidana penjara yang lama. Akan tetapi, dengan sblb.1926 No.251 jo.486 jangka waktu tersebut diperpendek menjadi dua per tiga dan palingkurang sembilan bulan telah dijalani. Ini berarti tidak ada pelepasan bersyarat sebelum sembilan bulan pidana dijalani.

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 KUHP



tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. jadi, umpanya pidana yang dijatuhkan lamanya sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani ena tahun. sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun. (tiga tahun ditambah satu tahun).

Menurut Schepper, advis Dewan Reklasering ((<http://adelesmagicbox.wordpress.com/2012/03/27/pelepasan-bersyarat/>) untuk diberikannya pelepasan bersyarat , meliputi:

1. Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat itu jika diberikan pelepasan bersyarat, apakah tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang akan mengganggu ketertiba umum dan peradilan
2. Sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pandangan masyarakat Indonesia, ini merupakan masalah sikap dan tingkah laku terpidana selama dalam penjara
3. Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, pekerjaannya, bantuan moral dari sanak keluarga atau reklasering.

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Pelepasan bersyarat dapat dicabut kembali atas usul jaksa di tempat terpidana berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reklasering.

Jika ia melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan, sambil menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 hari.

Jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut, terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

#### **4. Cuti Bersyarat**

proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan.

*(Psl. 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat)*

### **B. Pengertian Narapidana**

Menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana tidak boleh ada perbedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selain itu Narapidana juga diatur pada Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

### **C. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

##### **a. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno Muladi dan Barda Nawawi Arief (Bandung, Alumni 2005:hal.1), istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* , merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.

Menurut Andi Hamzah (2008:hal.27), ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal istilah *straf*. Istilah hukuman Andi Hamzah (1983:hal.20) adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana .

Menurut Bemmelen J.M (1987:hal.17) Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan . Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Menurut Satochid Kartanegara (PTIK angkatan V 1954-1955:hal.275-276) bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma

yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa manusia (*leven*);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- 3) Kehormatan seseorang (*eer*);
- 4) Kesusilaan (*zede*);
- 5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke Vryheid*);
- 6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*);

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

Menurut van Hamel(Armico,1984:hal.34)

*“eenbijzonderleed, tegen den overtreder van een door den staatgehandhaafdrechtsvoorschrift, op den enkelengrond van die overtrading, van wege den staats hand haver der openbarerechtsorde door met de rechtsbedeelinggezaguitte spreken.”*

(suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.)

b. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen (Leden Marpaung,2005:hal.2) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja (Leden Marpaung,2005:hal.2) menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan

hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Teori-Teori Pemidanaan**

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi (Andi Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa :

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 1993 : 27), bahwa :

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan

subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi (Andi Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa :

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan



menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni, Pidana Pokok :

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam.

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi (2002 : 31) berpendapat bahwa :

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergerakaknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy (Ahmad Ferry Nindra,2002:hal.9) menyatakan bahwa “pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal “.

Dalam Pasal 12 KUHP, R. Soesilo (1981:32) diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Hukaman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.

- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
- (4) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal , pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara Adami Chazawai ( 2002 : 38), yaitu :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karna alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi

maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/diekskusi, yaitu pada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Andi Hamzah (Ahmad Fery Nindra, 2002 : 12), adalah :

- a. pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidiar* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d. Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP.

Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

Mengenai pidana tutupan Adami Chazawai (2002 : 43), menyatakan bahwa :

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :



f. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasi martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP R. Soesilo (1981 : 47) hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alam (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri ;
6. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selamanya.
2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.

3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

g. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan pasal 39 KUHP R.Soesilo (1981 : 49), barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

1. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terdakwa dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
2. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

h. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP R.Soesilo (1981 : 51) menyatakan bahwa :

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim ,misalnya melalui surat kabar, radio,televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

Mengenai pengumuman putusan hakim Adami

Chazawi (2002 : 54) menyatakan bahwa :

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana).

## **D. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang telah mengalami perubahan dari istilah yaitu penjara.Berdasarkan asal-usul (*etimologi*) kata penjara berasal dari kata *penjoro* (Bahasa Jawa) yang artinya tobat, atau jearadipenjara dibuat tobat atau dibuat jera.

Penjara di kenal di Indonesia memalui KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht*) yang termuat dalam Pasal 14 berbunyi: “Orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala

pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29”.

Pasal 29(1) berbunyi :

“ Hal menunjuk tempat menjalani pidana penjara kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam diluar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya diatur dengan undang-undang sesuai dengan Kitab Undang-Undang ini “.

Rumusan penjara dalam Pasal 1 Reglemen Penjara Stbl. 1971 No.708 adalah sebagai berikut: “Perkataan penjara dalam reglemen ini artinya sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh Negara untuk tempat tinggal oleh orang-orang terpenjara”.

Uraian yang telah dijelaskan adalah perbandingan dari pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini dianut di Indonesia yang dikenal sejak tahun 1964 dalam Konfrensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964.

Suharjo Widiada Guna Karya menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah pencetus gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi Warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga setelah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota

masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya secara wajar.

Dalam pemisahan kata Bahasa Indonesia Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari dua kata yakni Lembaga dan Pemasyarakatan. Kata lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung makna Badan atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha. Sedangkan Pemasyarakatan secara *etimologi* berasal dari kata dasar masyarakat (suatu jenis kata benda) yang mendapat imbuhan pe-an. Kata pe-an mengandung makna “membuat jadi masyarakat”. Menurut ilmu bahasa kata benda yang mendapat imbuhan pe-an akan mengandung makna menyatakan peristiwa atau perbuatan, misalnya membuat atau membuat jadi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu wadah untuk menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan wargabinaan agar kelak dapat bermasyarakat kembali.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Ibnu Soesanto dalam suatu Majalah Pembinaan Hukum Nasional No. 1 tahun 1978 menulis bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah “suatu tempat dimana seseorang ditempatkan selama menunggu siding peradilan atau tempat dimana seseorang terdakwa ditempatkan seorang hukuman setelah ia terbukti bersalah”.

Lebih lanjut dijabarkan dalam surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 tahun 1996 menyatakan :“Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat Narapidana”.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan yang diberi tanggung jawab dalam menampung, membina, merawat dan mendidik pelanggar-pelanggar hukum (wargabinaan) menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum setelah membaur dengan masyarakat umum.

## **2. Fungsi dan Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan**

Begitu pentingnya fungsi dan masalah lembaga pemasyarakatan pedesaan kita perlu untuk mengamati lebih detail tentang lembaga apa saja dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan pertanian atau peternakan berfungsi untuk menunjang program pembangunan di pedesaan.

Lembaga pemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia mempunyai fungsi:

- Memberikan pedoman bagi masyarakat, bagaimana ia harus berbuat didalam menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan kita.

- Menjaga keutuhan masyarakat.
- Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial (*social control*) yang merupakan pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggotanya.

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan:

- Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni Basic Institution and Subsidiary Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
- Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctione Institution and unsanctioned Institution. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.

- Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General institutional and Restriktic Institutional. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif Institutional and regulative Institutional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

### **3. Hak-Hak Narapidana**

Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat



pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus harusdiayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal (14) secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, tetapi pada narapidana wanita ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia. Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang dibawah naungan kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dipilihnya lokasi ini karena Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja ini merupakan tempat yang memberi terpidana cuti menjelang bebas, dengan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu mengambil data dari hasil wawancara langsung dengan narapidana beserta petugas RUTAN tentang penerapan cuti menjelang bebas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber terutama aturan-aturan dasar pemasyarakatan dan literatur-literature pendukung penulisan ini.

### **C. Teknis Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam rangka penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Studi Pustaka,yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur baik berupa karya ilmiah,laporan,catatan,dokumen dan lain-lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

2. Studi Lapangan.

Kegiatan ini dilakukan dilokasi penelitian. Cara mengumpulkan data dengan menggunakan teknik :

- a. Observasi atau pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang di teliti. Pengamatan ini ditujukan kepada narapidana,para Pembina/staf dalam melaksanakan cuti menjelang bebas.
- b. Interview (Wawancara), yaitu dengan berkomunikasi langsung melalui wawancara terhadap beberapa narapidana dan informan lainnya. Untuk menjamin agar pertanyaan-pertanyaan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka disusun daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam wawancara.

#### **D. Teknis Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka selanjutnya di analisis secara kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis adalah menggunakan tabel frekuensi untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan cuti menjelang bebas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Tanah Toraja**

Sistem pemasyarakatan adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang dengan demikian istilah penjara juga diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk sekedar penjeraan, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan dapat dilihat pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.

Hak narapidana yang dimaksud diatas salah satunya adalah Cuti menjelang bebas merupakan salah satu hak narapidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Tahanan klas II B Kabupaten Tanah Toraja , bahwa jumlah narapidana yang

mendapatkan Cuti Menjelang Bebas sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.Jumlah Narapidana yang mendapat Cuti Menjelang Bebas.

Tahun	Jumlah Narapidana	Cuti Menjelang Bebas	Persentase (%)
2009	42	0	0%
2010	48	2	0,96%
2011	40	0	0%
2012	46	0	0 %
2013	45	0	0%

*Sumber data : RUTAN klas II B Kab.Tanah Toraja*

Berdasarkan penelitian selama berada di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja bahwa dalam proses pemidanaan, Rumah Tahanan Negara berhak melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di Pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera, namun tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik bagi masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana tersebut (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani masa pidananya juga mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai serta mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana.

Menurut Drs.F.K.Sarapang selaku Ketua Tim Unit Informasi di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten tanah toraja melalui

wawancara, beliau mengungkapkan bahwa narapidana yang diterima di Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Tanah Toraja wajib didaftar terlebih dahulu sebelum mengikuti proses pembinaan. Pendaftaran ini mengubah status Terpidana menjadi Narapidana. Pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi ;

- a. Pencatatan :
  - 1. Putusan Pengadilan
  - 2. Jati diri
  - 3. Barang atau uang yang di bawa
- b. Pemeriksaan kesehatan
- c. Pembuatan pas foto
- d. Pengambilan sidik jari
- e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Dalam proses pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja dikenal dua periode pembinaan, yaitu pembinaan di dalam RUTAN dan pembinaan di luar RUTAN. Pembinaan di luar RUTAN merupakan kelanjutan dalam pembinaan di dalam RUTAN. Cuti Menjelang bebas adalah hak dari narapidana yang merupakan bagian dari pembinaan di luar Rumah Tahanan Negara.

Selanjutnya Kamal Yahya,S.Pd selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Bidang Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan hak-haknya, narapidana terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja, yaitu :

- a. Tahap pertama atau tahap *maximum security*, penelitian, dan pengenalan lingkungan, serta diterimanya narapidana.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pembinaan dalam tahap ini meliputi :

1. Penjelasan mengenai hak-hak setiap narapidana, tata tertib yang harus ditaati selama berada di RUTAN klas II B Kabupaten Tanah Toraja.
  2. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti dan moral, kesehatan serta penyuluhan keagamaan.
- b. Tahap kedua atau tahap *medium security* atau tahap asimilasi awal.

Dalam tahap ini narapidana telah menjalani  $\frac{1}{3}$  sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya, para narapidana sudah dapat bekerja dan berolahraga di luar RUTAN klas II B Kabupaten Tanah Toraja dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas RUTAN.



- c. Tahap ketiga atau tahap *minimum security* atau tahap asimilasi lanjutan.

Tahap ini dimulai dari  $\frac{1}{2}$  sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Dalam tahap ini, narapidana sudah dapat diasimilasikan ke luar RUTAN tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar RUTAN bersama-sama masyarakat umum tanpa pengawalan dari petugas RUTAN melainkan berupa pengawasan dan bimbingan dari petugas RUTAN.

- d. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir.

Tahap ini adalah tahap pembinaan narapidana yang telah melalui  $\frac{2}{3}$  masa pidananya. Dalam tahap ini, narapidana yang memenuhi persyaratan akan diberikan cuti menjelang bebas. Pembinaan dalam tahap ini dilakukan di luar Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Tanah Toraja dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan istilah pembimbingan klien pemasyarakatan.

Cuti Menjelang Bebas yang merupakan hak dari narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir merupakan salah satu wujud dari pembinaan dalam proses pemasyarakatan. Berkelakuan baik merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh narapidana yang ingin mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, namun maksud dari berkelakuan baik tersebut

tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan.

Berdasarkan wawancara dengan Adriana Rumpang.,S.H. selaku staf di bidang Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Tanah Toraja , beliau mengungkapkan bahwa yang menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Tanah Toraja untuk mendapatkan izin Cuti Menjelang Bebas adalah narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan keinsyafan dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin.

Perilaku-perilaku kelakuan baik tersebut harus ditunjukkan oleh narapidana selama mengikuti tahapan pembinaan di dalam Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Tanah Toraja.

Selain syarat tersebut di atas yang merupakan syarat umum untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas terpenuhi, narapidana juga harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.4-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud di atas yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
  1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
  3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
  1. Asimilasi,  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya;
  2. Pembebasan Bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana barumaka selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

Sedangkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud di atas yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
  - 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
  - 2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Cuti Menjelang Bebas bukanlah hadiah cuma-cuma yang diberikan kepada narapidana, melainkan merupakan suatu perwujudan pembinaan yang memberi kesempatan kepada narapidana untuk belajar menyesuaikan diri dan bergaul lebih awal dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Selanjutnya KurniaSurpisum,S.Hi. selaku staf di bidang Pelayanan Tahanan menambahkan bahwa untuk mendapatkan izin cuti Menjelang Bebas juga harus ada surat jaminan. Surat Jaminan tersebut dibuat oleh keluarga narapidana yang diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dalam hal ini kepala *Kelurahan atau Kepala Desa*.

Bila narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, maka anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dibentuk oleh Kepala Rumah Tahanan Negara klas II B kabupaten Tanah Toraja akan mencatat narapidana-narapidana tersebut untuk kemudian diusulkan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan. Selanjutnya Kepala Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM setempat. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM menolak usulan pemberian cuti menjelang bebas tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala RUTAN.

Namun apabila Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM menerima usulan yang diberikan oleh Kepala RUTAN , maka Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM atas nama

Menteri Hukum dan HAM, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas tersebut.

Setelah semua prosedur di atas dilalui, selanjutnya Kepala Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Tanah Toraja menandatangani surat izin Cuti Menjelang Bebas berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

Tembusan surat keputusan izin Cuti Menjelang Bebas tersebut, selanjutnya disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
2. Balai Pemasyarakatan
3. Polres atau Polsek setempat
4. Pemerintah Setempat

Setelah narapidana diberikan petunjuk oleh Kepala Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Tanah Toraja, maka narapidana kemudian diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan setempat untuk dibina selama narapidana berada di luar RUTAN dengan disertai berita acara penyerahannya.

Berdasarkan penelitian selama di Rumah Tahanan Negara kelas II B Kab.Tanah Toraja, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara kelas II

B Kabupaten Tanah Toraja telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

**B. Faktor yang Menghambat Dalam Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Tanah Toraja**

Dalam mengikuti program pembinaan di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja , kesadaran dan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan sangat diharapkan, karena dalam sistem pemasyarakatan yang dikehendaki adalah tumbuhnya kesadaran dari narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum setelah bebas dari RUTAN.

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja, terlihat bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas sangat minim jumlahnya. Hal ini semakin jelas apabila dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja selama lima (5) tahun terakhir.

Perbedaan antara pembebasan bersyarat dengan cuti menjelang bebas adalah :

Pembebasan bersyarat dijalani oleh narapidana sampai dengan narapidana tersebut bebas sesungguhnya, kecuali narapidana tersebut mengulangi tindak pidana, meresahkan masyarakat dan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat maka hak pembebasan



bersyaratnya dicabut. Sedangkan cuti menjelang bebas paling lama dijalani oleh narapidana sampai dengan remisi terakhir yang didapat, yakni paling lama (6) enam bulan.

Adapun jumlah narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sejak tahun 2009 samapai dengan 2013 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat

Tahun	Jumlah Narapidana	Pembebasan Bersyarat	Persentase (%)
2009	42	7	2,94 %
2010	48	4	1,92 %
2011	40	3	1,2 %
2012	46	8	3,68 %
2013	45	3	1,35%

*Sumber data : Rumah Tahanan Negara klas II B Kab.Tanah Toraja.*

Minimnya jumlah narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas dalam lima (5) tahun terakhir menggambarkan bahwa terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iwan dan Susanto selaku narapidana di Rumah Tahanan Negara klas II B Kab.Tanah Toraja menyatakan bahwa pada umumnya mereka mengetahui tentang hak-hak yang mereka miliki selaku narapidana seperti hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan hak-hak yang lainnya. Hak-hak yang dari narapidana diketahui ketika mereka pertama kali menjadi penghuni Rumah Tahanan Negara klas II B Kab.Tanah Toraja Namun, mereka kurang mengetahui tentang syarat-syarat untuk mendapatkan

Cuti Menjelang Bebas, yang mereka ketahui hanyalah tentang syarat berkelakuan baik dan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Narapidana juga lebih memilih untuk berjuang mendapatkan pembebasan bersyarat dibandingkan cuti menjelang bebas, sebab menurut mereka pembebasan bersyarat lebih menguntungkan daripada cuti menjelang bebas yang hanya dapat dijalani dengan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir yakni paling lama enam (6) bulan saja.

Selanjutnya KurniaSurpisum,S.Hi. selaku staf di bidang Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara klas II B Kab.Tanah Toraja mengungkapkan , bahwa salah satu kendala untuk melaksanakan cuti menjelang bebas adalah jaminan dari keluarga narapidana. Perlu kiranya diketahui, bahwa yang menjadi narapidana di Rumah Tahanan Negara klas II B Kab.Tanah Toraja bukan hanya para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Tanah Toraja saja, melainkan juga dari berbagai daerah lain di sekitar Indonesia Timur. Bagi narapidana yang berasal dari luar Kabupaten Tanah Toraja biasanya akan terkendala pada surat jaminan dari keluarga yang disebabkan tempat tinggal keluarga yang jauh dari Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja. Jaminan dari keluarga narapidana juga harus disertai dengan jaminan dari Pemerintah setempat dalam hal ini serendah-rendahnya dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa tempat tinggal narapidana. Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa keluarga narapidana yang telah membuat surat jaminan untuk narapidana tetapi mereka tidak

mendapat jaminan dari Kepala Kelurahan tempat tinggalnya. Hal ini merupakan salah satu kendala untuk memberikan izin cuti menjelang bebas bagi narapidana yang bersangkutan.

Selain itu Adriana Rumpang,S.H. selaku staf di bidang Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja menambahkan, bahwa hambatan lainnya adalah keterlambatan surat keterangan dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak tersangkut perkara lain. Hal ini di dipandang perlu oleh oleh petugas Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja sebelum meberikan izin Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana, karena narapidana yang tersangkut perkara lain tidak akan diberikan izin Cuti Menjelang Bebas.

Kamal Yahya,S.Pd selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja menyatakan, bahwa pihak RUTAN mengutamakan untuk mengusulkan pembebasan bersyarat dibandingkan cuti menjelang bebas bagi narapidana dengan tidak mengenyampingkan aturan perundang-undangan yang ada. Ditambahkan pula, bahwa cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang mendapatkan vonis ringan dari pengadilan, sementara narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja pada umumnya lebih memilih untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.P.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pelaksanaannya ternyata narapidana lebih memilih untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat karena dukungan dari keluarga dan lebih menguntungkan dari pada cuti menjelang bebas yang hanya dapat dijalani dengan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir yakni paling lama 6 (enam) bulan saja.
2. Adapun faktor yang menghambat dalam Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara klas II B Kabupaten Tanah Toraja adalah kurangnya pengetahuan dari narapidana tentang syarat-syarat Cuti Menjelang bebas, keinginan dan motivasi yang kurang dari narapidana untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas dan tidak adanya jaminan dari pihak keluarga narapidana serta kurang optimalnya kerjasama antara instansi terkait.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang ada, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah

1. Agar kiranya petugas RUTAN klas II B Kabupaten Tanah Toraja lebih sering memberikan penerangan/penyuluhan bagi narapidana mengenai hak untuk Cuti Menjelang Bebas agar terbangun keinginan dan motivasi narapidana untuk mendapatkan izin Cuti menjelang Bebas.
2. Petugas RUTAN klas II B Kabupaten Tanah Toraja lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti kejaksaan dan instansi pemerintahan seperti kantor-kantor kelurahan atau kantor-kantor kecamatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta.
- ChazawiAdami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Dahlan, M. Y. Al-Barry et.al, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Pres, Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, Rusli, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Hamzah, Andi, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Bemmelen, van J.M. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Kartanegara, Satochid. 1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Sujatno, Adi.2003. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, StoraGrafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Prokoso, Djoko, 1988. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Purnomo, Bambang, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jogjakarta.

Hamzah, Andi, edisi revisi 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjobroto, Bahrudin, 1986. *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta

Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana Strata Satu FH-UH.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.4-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat